



# Ekonomi dan Budaya Harus Jalan Beriringan



Antara/Andreas Fitri Aismoko

**Penari dari** Kepulauan Seribu menarikan tarian *Pulang Babang Nelayan Nandak Pesisir* saat Pasar Malam Indonesia di Taman Budaya Embung Giwangan, Jogja, Kamis (7/8). Gelaran budaya yang menjadi rangkaian *Rakernas XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)* dan menampilkan pertunjukan seni yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara, termasuk pentas tradisional dari delegasi JKPI itu berlangsung hingga 9 Agustus 2025.

JOGJA—Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya harus berjalan selaras. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya dalam mendukung program Asta Cita, khususnya pada misi yang menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dalam harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Ariq Fajar Hidayat & Sirojul Khafid  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Sejumlah pemerintah daerah hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetapi mengabaikan aspek pelestarian budaya.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan peran strategis JKPI sebagai ruang kolaborasi lintas daerah berbasis kebudayaan.

Hal tersebut disampaikan Bima dalam *Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2025*. Ia menyampaikan terdapat tiga landasan utama dalam penguatan kota pusaka.

## Ekonomi dan Budaya...

*Pertama*, Kota Pusaka tidak hanya menyangkut aspek keindahan, tetapi juga memiliki potensi sebagai dasar penguatan ekonomi. *Kedua*, pelestariannya harus berkelanjutan dan lintas kepemilikan. *Ketiga*, kota pusaka memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya dan karakter kota.

"Kalau kita samakan frekuensinya, maka urusan budaya dan pusaka ini jadi modal luar biasa untuk menuju Indonesia Emas 2045. [Kota Pusaka bisa meningkatkan] pendapatan per kapita, menurunkan kemiskinan, dan lain-lain," kata Bima, Jumat (8/8).

Bima juga menyoroti sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetapi mengabaikan aspek pelestarian budaya. Menurutnya, budaya dan ekonomi seharusnya berjalan beriringan sebagai satu kesatuan identitas daerah. "Karena ngejar angka-angka cepat, tetapi pelestarian budayanya dikorbankan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan potensi budaya dan pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang memiliki kekayaan laut dan potensi wisata unik yang dapat dioptimalkan. Bima mengakui bahwa menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan warisan sejarah bukanlah perkara mudah. Diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara berbagai

aspek pembangunan.

"Di sinilah sebetulnya kita saling menguatkan. Bukan untuk menihilkan yang lain, bukan. Tapi untuk menyanggah ini, menyanggah antara *economic growth* dan warisan budaya tadi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bima mendorong kepala daerah agar meningkatkan imajinasi dan kolaborasi dalam mengelola potensi wisata dan budaya. Ia menyarankan agar kolaborasi dilakukan dengan komunitas budayawan, sejarawan, hingga arsitek melalui forum JKPI.

### Ruang Kolaborasi

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan peran strategis JKPI sebagai ruang kolaborasi lintas daerah berbasis kebudayaan. Menurutnya, kebersamaan yang dibangun melalui seni dan budaya dapat melampaui sekat-sekat seperti latar belakang politik.

Hasto mengatakan hubungan antar kepala daerah kerap dipisahkan oleh perbedaan politik. Namun di ruang kebudayaan, perbedaan tersebut tidak lagi menjadi penghalang.

"Ketika kita menikmati seni dan berkarya, budaya ini tidak pernah mengenal siapa kamu, dari mana, siapa, dan latar belakangnya apa. Semua menyuguhkan karya-karya yang berbasis seni dan budaya," kata Hasto saat diwawancarai, Kamis (7/8).

Menurut Hasto, nilai besar yang harus dijunjung tinggi dalam JKPI adalah kebersamaan tanpa

batas. Ia menegaskan seni dan budaya memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai pihak.

"Kebersamaan di dalam kebudayaan itu betul-betul tanpa batas. Bisa menyatu tanpa batas. Itulah JKPI," kata dia.

Rakernas JKPI XI 2025 di Jogja menjadi momentum memperkuat peran budaya sebagai perekat bangsa. Selain mempertemukan para kepala daerah dan delegasi, acara ini juga menampilkan beragam pertunjukan budaya dari seluruh nusantara.

Ia menilai program JKPI yang berjalan saat ini sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ajang pertemuan tersebut menjadi sarana pertukaran informasi, adat, tradisi, dan budaya dari masing-masing wilayah anggota.

Bagi Hasto, pagelaran budaya seperti ini bukan sekadar tontonan, melainkan juga pembelajaran tentang bagaimana kebudayaan dapat dikontekstualkan sesuai kondisi daerah. Ia mencontohkan, budaya mampu menjadi solusi atas persoalan lokal, termasuk ekonomi dan pendapatan daerah. "Dengan nguri-uri budaya, dengan merawat budaya, maka kesejahteraan masyarakat juga tersupport. UMKM banyak yang bisa dilibatkan," ucapnya.

Rakernas JKPI XI 2025 di Jogja sendiri memasuki hari terakhir pada Sabtu (9/8). Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan Pasar Malam Indonesia di Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG) yang juga akan menampilkan beragam pentas kesenian. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005